

ANALISIS PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KOTA KUPANG

Andrianus Pattimau
apattimau@gmail.com
Pelaksana BKAD Kota Kupang

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i3.6555

Key word:

Optimization, Locally-generated revenue, Government capital participation.

Abstract

This research aims to determine the development and utilization of regional financing and its influence on Regional Original Income. This research was conducted at the Kupang City Regional Financial and Asset Agency, using statistical regression analysis tests to determine and test the relationship and/or influence of capital participation on local original income. Based on the test, it is concluded that; 1) Permanent regional capital (investment) participation for five years experienced an increase that was not constant or experienced fluctuations. The conclusion is drawn that the regional capital participation (investment) which has a permanent positive effect on regional original income is rejected; 2) Non-permanent regional capital (investment) participation does not involve non-permanent regional capital (investment) every year. The conclusion is drawn that there is an insignificant influence between non-permanent regional capital participation (investment) and regional original income; 3) Permanent and non-permanent regional capital participation (investment) for nine years has experienced an increase that is not constant or fluctuating. The conclusion is drawn that permanent and non-permanent regional capital participation (investment) together have no effect on regional original income; and 4) Based on data analysis using LINDO version 19.0, that the regional capital participation (investment) only focuses on two companies (Bank NTT and PDAM Kupang City), so it has not been able to make a large contribution to locally-generated revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pemanfaatan pembiayaan daerah serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, dengan menggunakan uji statistik analisis regresi untuk mengetahui dan menguji hubungan dan/atau pengaruh penyertaan modal terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen, selama lima tahun mengalami kenaikan yang tidak konstan atau mengalami fluktuasi. Penyertaan modal (investasi) daerah bersifat permanen berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah ditolak; 2) Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat nonpermanen tidak setiap tahun ada penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat nonpermanen. Ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan antara penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat nonpermanen dengan pendapatan asli daerah; 3) Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan nonpermanen selama sembilan tahun mengalami kenaikan yang tidak konstan atau berfluktuasi. Ditarik kesimpulan bahwa penyertaan modal (investasi) daerah bersifat permanen dan nonpermanen bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah; dan 4) Berdasarkan analisis data dengan menggunakan LINDO versi 19.0, bahwa penyertaan modal (investasi) daerah hanya berfokus pada dua perusahaan saja (Bank NTT dan PDAM Kota Kupang), sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci:

Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Penyertaan modal pemerintah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan penerimaan untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Untuk membiayai kebutuhan tersebut pemerintah daerah memperoleh pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD, sedangkan anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sebaliknya defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (PP No. 58 Tahun 2005 pasal 1).

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (PP No. 58 Tahun 2005 pasal 1).

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah. Sedangkan defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup; Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBD dan untuk pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah yakni pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004: 67).

Pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dipengaruhi oleh penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana komponen-komponen pembiayaan ini memberikan dampak yang cukup besar dalam pendapatan asli daerah khususnya yang mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini semakin meningkat pula hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Ada banyak peneliti yang telah meneliti masalah sejenis dengan penelitian yakni Mubaroq (2013) yang berjudul “Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Desentralisasi Fiskal terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Menunjukkan bahwa Investasi Pemerintah”, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi fiskal kabupaten di Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Utami (2011) dengan judul “Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD Menyatakan bahwa Investasi Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah”, dan Palupi (2011) menyatakan bahwa penanaman investasi jangka panjang maupun jangka pendek layak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok.

Perkembangan surplus/defisit anggaran, pembiayaan dan PAD Pemerintah Kota Kupang dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan dan PAD

Uraian	2017	2018	2019
Surplus (Defisit)	(722.059.561)	(7.236.940.482)	(13.291.333.850)
Pembiayaan	90.883.736.024	84.956.909.490	77.521.586.765
PAD	229.137.473.529	171.490.709.097	108.319.931.686

Sumber: Pemerintah Kota Kupang (Diolah).

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek. Dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, mengenai bentuk, sifat dan jenis-jenisnya (PKPA, 2006: PSAP 06 – 5).

Dalam Pemerintah Kota Kupang pemanfaatan pembiayaan daerah yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah khususnya investasi berjangka panjang baik investasi permanen maupun investasi nonpermanen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang analisis perkembangan dan pemanfaatan pembiayaan daerah serta pengaruhnya terhadap PAD di Pemerintah Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut (1) Untuk mengetahui dampak sejauh mana kemampuan Pemerintah Kota Kupang menerapkan sistem anggaran berimbang dengan baik; (2) Untuk mengetahui keefektivitasan pembiayaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut (1) Bagaimana perkembangan pembiayaan daerah di Pemerintah Kota Kupang? (2) Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah di pemerintah kota kupang? (3) Bagaimana pemanfaatan pembiayaan daerah di Pemerintah Kota Kupang? (4) Seberapa besar pengaruh pemanfaatan pembiayaan daerah melalui penyertaan modal (investasi) daerah terhadap pendapatan asli daerah? (5) Bagaimana alokasi penyertaan modal (investasi) daerah yang sesuai untuk meningkatkan PAD secara optimal?

TINJAUAN TEORETIS

Pembiayaan Daerah

Andayani (2006: 139) menyatakan bahwa pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan dalam anggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

Menurut Darise (2008: 50), pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Darise (2008: 100) menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencarian dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan (Darise, 2008: 101).

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan (Darise, 2008: 101).

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan (Sumarsono, 2009: 130) berasal dari: (a) Penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, merupakan selisih lebih realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, sedangkan realisasi SiLPA dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemerintah daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya; (b) Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah sebagaimana ditetapkan dalam pemerintah daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan; (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah; (d) Penerimaan pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali; (e) Penerimaan kembali pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; (f) Penerimaan piutang daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Menurut Sumarsono (2009: 131-132), transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: (a) Pembentukan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditrasfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan; (b) Penyertaan modal pemerintah daerah, digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran. Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan. Investasi (penyertaan modal) daerah dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah; (c) Pembayaran pokok pinjaman (utang), digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran, termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; (d) Pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan neto (Afiah, 2010: 101).

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan daerah hanya ditemui pada badan pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak ditemui pada SKPD lainnya. Ketentuan yang harus diperhatikan/dipenuhi dalam pelaksanaan anggaran pembiayaan (Darise, 2008: 165), yaitu: (a) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui kas umum daerah; (b) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian berkenaan; (c) Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan; (d) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain seperti, pemerintah daerah lainnya, BUMD berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman; (e) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah; (f) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedang pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah didasarkan pada bukti penerimaan yang sah seperti dokumen lelang, akte jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya; (g) Dalam kaitannya dengan pembentukan dana cadangan, pemindah bukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan kepala SKPKD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Darise (2008: 135) menyatakan bahwa, pendapatan asli daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004: 68) menyatakan, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, perusahaan daerah, deviden, deviden BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Darise, 2008: 136).

Berdasarkan uraian teoritis, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁ : Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen berpengaruh positif terhadap PAD

H₂ : Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat nonpermanen berpengaruh positif terhadap PAD

H₃ : Penyertaan modal (investasi) daerah bersifat permanen dan nonpermanen secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep penelitian yakni perkembangan pembiayaan daerah, pemanfaatan pembiayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (1) Perkembangan pembiayaan daerah adalah naik turunnya pembiayaan neto setiap tahunnya. Perkembangan pembiayaan ini akan dilihat dari hasil surplus/defisit tahun anggaran sebelumnya; (2) Pemanfaatan pembiayaan daerah dalam hal ini penggunaan surplus digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Penyertaan modal (investasi) daerah ini antara lain penyertaan modal (investasi) daerah permanen dan penyertaan modal (investasi) daerah nonpermanen. Pemanfaatan pembiayaan daerah merupakan variabel independen atau variabel bebas; (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD akan diambil dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penulisan adalah laporan perhitungan APBD Pemerintah Kota Kupang selama 5(lima) tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda, dengan uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2, sedangkan uji F digunakan untuk menguji hipotesis 3. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan alat analisis yakni analisis regresi berganda yang mana akan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Analisis Pendahuluan

Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif baik kualitatif dan kuantitatif. Variabel-variabel yakni perkembangan pembiayaan, pemanfaatan pembiayaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan pembiayaan yang menjadi indikator adalah jumlah surplus dan/atau defisit pembiayaan setiap tahun. Pemanfaatan pembiayaan daerah dengan indikator penyertaan modal(investasi) daerah permanen dan nonpermanen sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005. Sedangkan untuk PAD yang menjadi indikator adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam tahap ini, analisis deskriptif kuantitatif adalah sebagai berikut :

$$\text{Mean untuk populasi } \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \text{ atau } \frac{1}{N} (X_1 + X_2 + \dots + X_n) \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Mean (rata – rata) untuk sampel : } \bar{x} = \sum_{i=0}^n \frac{X_i}{n} \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{Standard Deviasi (simpangan baku) } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}} \dots \dots \dots (3)$$

Analisis Lanjutan

Pada tahap ini, hipotesis akan diuji dengan alat analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan asli daerah
- X₁ = Penyertaan modal (investasi) permanen
- X₂ = Penyertaan modal (investasi) nonpermanen
- α = Konstanta
- b₁ dan b₂ = Koefisien regresi

Nilai-nilai a, b₁, dan b₂ dapat ditemukan dengan rumus, sebagai berikut :

$$b_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y) - (\sum x_2 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 \sum x_2)} \dots\dots\dots (5)$$

$$b_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y) - (\sum x_1 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 \sum x_2)} \dots\dots\dots (6)$$

$$a = \frac{\sum Y - b_1 \sum X_1 - b_2 \sum X_2}{n} \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} \sum x_1^2 &= \sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n} \\ \sum x_2^2 &= \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n} \\ \sum x_1 x_2 &= \sum X_1 X_2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)}{n} \\ \sum x_1 y &= \sum X_1 Y - \frac{(\sum X_1)(Y)}{n} \\ \sum x_2 y &= \sum X_2 Y - \frac{(\sum X_2)(Y)}{n} \\ \sum y^2 &= \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \end{aligned}$$

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis 3. Uji F (uji serentak) adalah uji statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Y). Rumus Uji F adalah sebagai berikut :

$$F_o = \frac{R^2(n - k - 1)}{k(1 - R^2)} \text{ atau } F_o = \frac{\frac{R^2(\sum y^2)}{k}}{(1 - R^2)(\sum y^2)} \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan :

- n = Jumlah subjek
- k = Jumlah penyertaan modal (investasi) permanen dan nonpermanen
- $\sum y^2$ = Jumlah kuadrat PAD

Uji t (uji individual) adalah uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2. Rumus uji t adalah sebagai berikut :

$$t_o = \frac{b_1 - B_i}{S_{b_1}}, i = 1, 2, 3 \dots\dots\dots (9)$$

Karena penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas, maka nilai S_{b1} dan S_{b2} adalah sebagai berikut :

$$S_{b_1} = S_e^2 \frac{\sum x_2^2}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)} \dots\dots\dots (10)$$

$$S_{b_2} = \sqrt{S_e^2 \frac{\sum x_1^2}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}} \dots\dots\dots (11)$$

$$S_e = \sqrt{\frac{\sum e_1^2}{n-3}} = \sqrt{\frac{\sum Y^2 - \sum b_1 \sum X_1 Y - b_2 \sum X_2 Y}{n-3}} \dots\dots\dots (12)$$

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji serentak adalah, sebagai berikut:

- H_o diterima (H₁ ditolak) apabila F_o ≤ F_{α: (v1)(v2)}
- H_o ditolak (H₁ diterima) apabila F_o > F_{α: (v1)(v2)}

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji individual, adalah sebagai berikut :

- H_o diterima (H₁ ditolak) apabila t_o ≤ t_α
- H_o ditolak (H₁ diterima) apabila t_o > t_α

Dalam tahap ini pula penelitian menggunakan uji program linier, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya melalui penyertaan modal (investasi) daerah baik permanen dan nonpermanen. Aminudin (2002:11) menyatakan bahwa rumus uji linier adalah sebagai berikut :

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \dots \dots \dots (13)$$

Dengan batasan-batasan, sebagai berikut :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq a_{1m} \dots \dots \dots (14)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq a_{2m} \dots \dots \dots (15)$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq a_{m} \text{ dan } x_j \geq 0 \text{ untuk } j = 1, 2, \dots, n \dots \dots (16)$$

Keterangan :

Z = Fungsi tujuan yang dicari nilai optimalnya yakni pendapatan asli daerah.

C_j = Kenaikan nilai Z apabila pertambahan tingkat X_j dengan satu-satuan unit (sumbangan) setiap satuan keluaran kegiatan j terhadap Z.

n = Macam kegiatan yang menggunakan sumber (fasilitas) yang tersedia.

m = Macam batasan sumber (fasilitas) yang tersedia

X_j = Tingkat kegiatan ke- j.

a_{ij} = Banyaknya sumber i yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran dengan j.

b_j = Kapasitas sumber j yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dimana penulis mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen mengenai laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menguraikan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sesuai dengan teknik analisis data di atas mengenai perkembangan pembiayaan, pemanfaatan pembiayaan dan peningkatan PAD. Tabel 2 adalah tabel pendapatan daerah, belanja daerah dan surplus/defisit tahun 2015-2019.

Tabel 2
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Surplus/Defisit Tahun 2015-2019

Uraian	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2015	1.020.930.686.935,20	992.065.739.353,85	28.864.947.581,35
2016	1.141.379.963.658,93	1.173.081.919.042,00	(31.701.955.383,07)
2017	1.156.105.794.118,85	1.156.827.853.679,43	(722.059.560,58)
2018	1.169.535.197.600,75	1.176.772.138.082,80	(7.236.940.482,05)
2019	1.164.514.406.237,52	1.177.805.740.087,88	(13.291.333.850,36)

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang (Diolah)

Tabel 3
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Pembiayaan	Perkembangan	
		(Rp)	%
2015	120.918.739.354,40	-	-
2016	132.375.122.272,40	11.456.382.918,00	9,47
2017	90.883.736.024,33	(41.491.386.248,07)	(31,34)
2018	84.956.909.489,75	(5.926.826.534,58)	(6,52)
2019	77.521.586.764,70	(7.435.322.725,05)	(8,75)

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang (Diolah)

Tabel 3 menunjukkan perkembangan pembiayaan tahun 2017-2019. Perkembangan pembiayaan mengalami fluktuasi, peningkatan terjadi pada tahun 2016 sebesar 9,47%, sedangkan tahun 2017 sampai dengan 2019 penurunan berkisaran -6,52% sampai 31,34% dengan penurunan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp41.491,386.248,07.

Pemanfaatan pembiayaan Pemerintah Kota Kupang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) baik permanen dan non permanen. Pemerintah Kota Kupang melakukan investasi permanen di beberapa BUMD dan pihak ketiga antara lain : Bank NTT, KPN Maju, PT. Sasando, dan PDAM sesuai dengan Peraturan daerah, sedangkan untuk investasi non permanen Pemerintah Kota Kupang memberikan dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat. Tabel 4 adalah pemanfaatan pembiayaan di Pemerintah Kota Kupang.

Tabel 4
Pemanfaatan Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Pemanfaatan Pembiayaan	
	Penyertaan Modal (Investasi) Permanen	Penyertaan Modal (Investasi) Non Permanen
2015	12.500.000.000,00	-
2016	17.500.000.000,00	-
2017	10.000.000.000,00	-
2018	5.000.000.000,00	-
2019	-	-

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang (Diolah)

Penyertaan modal (investasi) daerah sampai dengan 2019 sebesar Rp45.000.000.000,00 kepada Bank NTT sebesar Rp35.000.000.000 dan PDAM sebesar Rp10.000.000.000, sedangkan dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp0.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 13,98% dan tahun 2017 meningkat 38,49%, kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 25,16% lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,91%, peningkatan PAD dapat kita lihat pada tabel 5.

Tabel 5
Perkembangan PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Perkembangan	
		(Rp)	%
2015	145.154.792.156,20	-	-
2016	165.449.023.460,93	20.294.231.304,73	13,98
2017	229.137.473.528,55	63.688.450.067,62	38,49
2018	171.490.709.096,75	(57.646.764.431,80)	(25,16)
2019	185.051.575.342,52	13.560.866.245,77	7,91

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang (Diolah).

Analisis terhadap hasil riset berdasarkan teori/hasil kajian riset terdahulu

Dalam bagian ini akan dibahas hasil pengolahan pengujian hipotesis dengan menggunakan modal persamaan regresi berganda, yakni : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ dan hasil pengolahan program linier menggunakan model $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$ dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 dan LINDO Versi 19.0. Tabel 6 adalah tabel pemanfaatan pembiayaan dan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019.

Tabel 6
Pemanfaatan Pembiayaan dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pemanfaatan Pembiayaan		Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan)
	Penyertaan Modal (Investasi) Permanen	Penyertaan Modal (Investasi) Non Permanen	
2015	12.500.000.000,00	-	15.665.854.762,00
2016	17.500.000.000,00	-	15.097.499.062,00
2017	10.000.000.000,00	-	13.421.285.898,00
2018	5.000.000.000,00	-	14.422.201.043,00
2019	-	-	14.378.818.417,00

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang (Diolah)

Hasil Estimasi

Hasil estimasi penyertaan modal (investasi) permanen, penyertaan modal (investasi) non permanen dan pendapatan asli daerah menggunakan SPSS versi 16.0, diperoleh koefisien korelasi berganda variabel penyertaan modal (investasi) permanen dan non permanen terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Kupang sebesar $(R) = 0.416$. Berarti kedua variabel secara bersama-sama mempunyai hubungan kuat positif. koefisien determinasi ($R\ square$) = 0.173 atau 17,30%, artinya variabel penyertaan modal (investasi) permanen dan non permanen dapat menjelaskan perubahan tingkat pendapatan asli daerah sebesar 17,30%, sedangkan 82,70% dijelaskan oleh variabel lain, selain variabel penyertaan modal (investasi) permanen dan non permanen.

Berdasarkan hasil olahan SPSS versi 16.0 didapat konstanta sebesar 1,413 dengan koefisien regresi penyertaan modal (investasi) permanen dan penyertaan modal (investasi) non permanen masing-masing sebesar 0,052 dan 0, maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$PAD = 1,413 + 0,052 \text{ Penyertaan modal (investasi) permanen}$$

Dari persamaan diatas, berarti PAD akan naik, bila penyertaan modal (investasi) permanen ditingkatkan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Individual

Dari *output* SPSS versi 16.0, diperoleh hasil perhitungan dimana besarnya koefisien korelasi parsial penyertaan modal (investasi) daerah permanen terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Kupang sebesar 0,416, dengan signifikansi 0.487 atau 48,70%.

Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan bahwa penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Kupang dengan taraf nyata (α) = 5% atau 0.05, nilai t tabel dengan derajat bebas (db) = $n - 2 = 5 - 2 = 3$ maka nilai $t_{0,005;3} = 2,35336$. Dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $t_0 \leq t_a$ atau H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $t_0 > t_a$, Nilai t_0 yang diperoleh sebesar 0,791%, maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima.

Hasil regresi secara individu penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen terhadap pendapatan asli daerah dimana besarnya koefisien korelasi secara parsial sebesar 0 dengan signifikansi 0 atau 0%.

Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan bahwa penyertaan modal (investasi) daerah non permanen terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Kupang dengan taraf nyata (α) = 5% atau 0.05, nilai t tabel dengan derajat bebas (db) = $n - 2 = 5 - 2 = 3$ maka nilai $t_{0,005;3} = 2,35336$. Dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $t_0 \leq t_a$ atau H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $t_0 > t_a$, Nilai t_0 yang diperoleh sebesar 0, maka dapat dikatakan H_0 diterima.

Hasil Uji Serentak

Dari *output* SPSS versi 16.0, diperoleh koefisien korelasi berganda variabel penyertaan modal (investasi) yang bersifat permanen dan non permanen terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Kupang sebesar $(R) =$ untuk uji hipotesis serentak dengan taraf nyata (α) = 5% atau 0.05, nilai F

tabel dengan derajat bebas, $V1 = 3-1 = 2$, $V2 = 5-3 = 2$ sebesar $F_{0,05(2)(2)} = 19,00$, Dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $F_0 \leq F_a$ atau H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $F_0 > F_a$, Nilai F_0 yang diperoleh sebesar 0,626, maka dapat dikatakan H_0 diterima.

Hasil Program Linier

Hasil program linier dengan menggunakan LINDO versi 19 untuk optimalisasi dalam hal ini memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui alokasi penyertaan modal (investasi) daerah dengan pengalokasian yakni Bank NTT, PD. PASAR, PDAM dan masyarakat.

Berdasarkan hasil program linier, didapat Hasil pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan optimal jika PT Sasando dan PDAM memiliki nilai satu dengan tingkat optimal hasil pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp751.127.000.000.

Dengan fungsi tujuan sebagai berikut:

$145.154.792.156,20X_1 + 165.449.023.460,93X_2 + 229.137.473.528,55X_3 + 171.490.709.096,75X_4 + 85.051.575.342,52X_5$, fungsi kendala sebagai berikut :

1. $10.000.000.000X_1 + X_2 + 2.500.000.000X_3 + X_4 + X_5 \leq 15.665.854.762$
2. $10.000.000.000X_1 + X_2 + 7.500.000.000X_3 + X_4 \leq 15.097.499.062$
3. $10.000.000.000X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \leq 13.421.285.898$
4. $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \leq 14.422.201.043$
5. $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \leq 14.378.818.417$

Faktor-faktor penting yang menjelaskan hasil analisis

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen meningkat maka pendapatan asli daerah meningkat, dimana setiap Rp0.052 akan meningkat Rp1 hasil pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal (investasi) daerah permanen merupakan penyertaan modal (investasi) daerah yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, untuk hipotesis pertama yang menyatakan penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan karena penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen yang dilakukan pemerintah kota kupang mengalami kenaikan yang tidak konstan atau mengalami fluktuasi selama lima tahun dan tidak cepat menghasilkan karena hanya berkonstenrasi pada Bank NTT dan PDAM Kota Kupang.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa setiap Rp0 penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat nonpermanen akan mempengaruhi Rp1 hasil pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal (investasi) daerah nonpermanen adalah penyertaan modal (investasi) daerah yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, untuk hipotesis kedua yang menyatakan penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini juga disebabkan karena penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang selama sembilan tahun hanya dilakukan tiga tahun atau penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Hipotesis ketiga yang menyatakan penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan non permanen bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah juga ditolak. Hal ini disebabkan karena penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan non permanen yang

dilakukan pemerintah kota kupang tidak mengalami kenaikan yang konstan atau mengalami fluktuasi dan penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen hanya dilakukan selama tiga tahun saja dari sembilan tahun atau penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah ini masuk dalam pendapatan asli daerah, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil analisis program linier menunjukkan bahwa hasil pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat mencapai tingkat optimal Rp751.127.000.000 dengan ketentuan alokasi penyertaan modal (investasi) daerah dalam satu periode jangan hanya berfokus kepada Bank NTT dan PDAM tetapi juga kepada BUMD dan BUMN yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mencoba menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui keefektivitasan pembiayaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Kupang, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan dua variabel independen (penyertaan modal (investasi) daerah permanen dan non permanen) dan satu variabel dependen (pendapatan asli daerah) menunjukkan bahwa (1) Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen di Pemerintah Kota Kupang selama lima tahun mengalami kenaikan yang tidak konstan atau mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ditarik kesimpulan bahwa variabel penyertaan modal (investasi) daerah bersifat permanen berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan karena penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen tidak cepat menghasilkan dan mengalami kenaikan yang fluktuasi, sehingga penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. (2) Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen di Pemerintah Kota Kupang tidak setiap tahun ada penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen. Ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan antara penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen dengan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena kecilnya dana penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen, sehingga penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat non permanen belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. (3) Penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan non permanen di Pemerintah Kota Kupang selama sembilan tahun mengalami kenaikan yang tidak konstan atau berfluktuasi. Ditarik kesimpulan bahwa penyertaan modal (investasi) daerah bersifat permanen dan non permanen bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena kenaikan penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan non permanen berfluktuasi atau tidak konstan dan tidak cepat menghasilkan, sehingga penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan non permanen belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. (4) Berdasarkan analisis data dengan menggunakan LINDO versi 19.0, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa penyertaan modal (investasi) daerah Pemerintah Kota Kupang hanya berfokus pada dua perusahaan saja (Bank NTT dan PDAM Kota Kupang), sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yang relevan terkait hasil kajian (limitasi kajian) adalah keterbatasan data atau dokumen pendukung dalam melakukan analisis pendahuluan dan analisis lanjutan dan keterbatasan waktu dalam penyusunan karya tulis ini. Sehingga saran bagi Pemerintah Kota Kupang adalah (1) Pemerintah Kota Kupang perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan penyertaan modal (investasi) daerah ke berbagai sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan PAD, bukan hanya bergantung pada dua perusahaan saja. Dengan diversifikasi investasi, risiko fluktuasi dapat diredam dan peluang untuk meningkatkan PAD menjadi lebih terbuka; (2) Investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD. Pemerintah Kota Kupang dapat memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pembangunan jalan, air bersih, dan listrik; (3) Penting untuk memastikan bahwa proses alokasi dan penggunaan dana penyertaan modal (investasi) daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana tersebut

digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan PAD; (4) Pemerintah Kota Kupang dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan. Kemitraan semacam ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana penyertaan modal (investasi) daerah yang bersifat permanen dan non permanen; (5) Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal. Dengan demikian, PAD dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan kualitas tenaga kerja; (6) Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan PAD. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, S. (2010). *Manajemen Keuangan Publik: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andayani. (2006). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darise, A. (2008). *Manajemen Keuangan Pemerintah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Bunga Rampai.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mubarq, M. R., Remi, S. S., dan Muljarijadi, B. (2013). Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia Tahun 2007-2010. *Jurnal Mahasiswa*. Universitas Padjajaran. <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/124097>
- Palupi, D. Y. (2011). Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PKPA. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia: PSAP 06 - Investasi dalam Bentuk Aset Tetap*.
- Sumarsono. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Utami, A. M. (2013). Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.